# BAB II

# TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori-teori terkait dengan penelitian seperti teori utama penelitian (*grand theory*), teori mengenai legitimasi, keagenan dan stakeholder .Semua pembahasan tersebut tertuang pada sub bab landasan teoritis.

Selain teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, pada bab ini juga akan dijabarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan dari setiap variabel yang diteliti dan hipotesis yang merupakan dugaan sementara penulis akan hasil penelitian.

## A. Landasan Teoritis

1. *Grand Theory*
2. Teori Legimitasi

Pengertian legitimasi menurut Dowling & Pfeffer (Dowling & Pfeffer, 1975) adalah :

“*appraisal of action in terms of shared or common values in the context of the involvement of the action in the social system*”

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. (Rolikhanasari, 2016)

Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat ’kontrak sosial’ antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi.

1. Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Manajemen sendiri adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk menjalankan kepentingan pemegang saham itu sendiri dan nantinya harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen dan Meckling (Jensen, M., & Meckling, 1976) menjelaskan teori keagenan sebagai :

“*Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating making authorityto the agent.*”

Akibatnya, manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi saja dan bukan untuk memaksimumkan perusahaan sehingga muncul biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* sendiri merupakan jumlah dari biaya pengawasan yang dilakukan oleh *principal* dengan jumlah dari biaya *bonding* yang dilakukan oleh agen serta jumlah dari biaya residual. (Jensen, M., & Meckling, 1976)

1. Teori *Stakeholder*

Pengertian *stakeholder* menurut Hummels (Hummels, 1998) adalah :

“(*Stakeholder are) individuals and groups who have a legitimate claim on the organization to participate in the decision-making process simply because they are affected by the organization’s practices, policies and actions.”*

Maka teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memang ditenttukan oleh para *stakeholders*, sehingga aktivitas perusahaan juga ditentukan atas pertimbangan dari para *stakeholders*-nya. Apabila semakin kuat posisi *stakeholders*, akan semakin besar pula kecenderungan perusahaan dalam beradaptasi terhadap keinginan para *stakeholders*-nya.

Di samping itu, perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat cenderung akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial di perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.

1. Laporan Keuangan
2. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (*Standar Akuntansi Keuangan*, 2016) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

1. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI) dalam (*Standar Akuntansi Keuangan*, 2016), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Menurut Suwardjono (2010), tujuan pelaporan keuangan adalah kearah mana segala upaya dan tindakan dan pertimbangan dicurahkan. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntasi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan laporan keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasikan dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasi pihak yang dituju. Pada gilirannya pihak yang dituju akan melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Dengan demikian diharapkan tujuan yang lebih luas (tujuan ekonomik dan sosial negara) akan tercapai pula.

1. Pengungkapan

Pengungkapan adalah pembeberan hal-hal informasi yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan cara-cara penyampaiannya. Standar pengungkapan suatu kejadian biasanya menetapkan apakah suatu informasi harus disajikan secara terpisah dari laporan utama, apakah informasi tersebut digabungkan dengan pos laporan yang lain, apakah suatu pos laporan perlu dirinci atau apakah informasi tersebut cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*). Dengan hal-hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi seperti diuraikan diatas, diharapkan bahwa laporan keuangan akan ditafsirkan dengan benar dan tidak menyesatkan pemakainya. (Ikhsan & Suprasto, 2008)

Pengungkapan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib (*mandatory*).

Pengungkapan wajib (*mandatory*) adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang (Pajak, Undang-Undang, SAK, maupun BAPEPAM).

Sedangkan pengungkapan sukarela pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan, mencangkup lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, krterlibatan masyarakat dan umum. Pengungkapan tanggung jawab pun menjadi salah satu pengungkapan yang tergolong sukarela namun wajib dilakukan.

### Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut (McWilliams & Siegel, 2001) CSR didefinisikan sebagai tindakan yang muncul untuk lebih lanjut beberapa kebaikan sosial, di luar kepentingan perusahaan dan apa yang dituntut oleh hukum. Bisa dikatakan bahwa CSR sendiri melampaui kepatuhan terhadap hukum itu sendiri.

Permasalahan yang muncul dalam lingkup sosial dan lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan keadaan lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya tantanga tersebut, terjadilah pergeseran pemahaman yang membuat para pelaku usaha tidak lagi bertumpu pada *profit* (*single bottom line*) melainkan bertumpu pada konsep *profit,people* dan *planet* atau yang kita kenal sebagai *triple bottom line*.

Konsep ini dikemukakan oleh (Elkington, 2001) bahwa *triple bottom line* muncul karena adanya tuntutan masyarakat terhadap peran perusahaan di lingkungan, tentu hal ini menjadi tuntutan masyarakat setelah terjadinya berbagai macam peristiwa sosial dan lingkungan yang ada.

*Profit* Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. *People*. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. *Planet*. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati.(Tanudjaja, 2006)

### *Global Reporting Initiative*

1. Definisi GRI

Menurut <https://www.globalreporting.org>, *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah organisasi nirlaba yang bekerja kearah ekonomi global yang berkelanjutan dengan memberikan panduan pelaporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan di dunia.

GRI berkomitmen untuk perbaikan kerangka secara continue dan aplikasi di seluruh dunia. Kerangka ini memungkinkan semua organisasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, kinerja sosial dan pemerintahan.

Kerangka pelaporan, yang meliputi pedoman pelaporan, pedoman sektor dan sumber daya lain, memungkinkan adanya transparansi organisasi yang lebih besar tentang ekonomi, kinerja lingkungan, sosial dan pemerintahan.Transparansi dan akuntabilitas ini membangun kepercayaan pemangku kepentingan dalam organisasi, dan dapat menyebabkan banyak manfaat lainnya.Ribuan organisasi, dari semua ukuran dan sektor, menggunakan kerangka GRI untuk memahami dan mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan mereka.

1. Indikator *Global Reporting Initiative*

Salah satu panduan pelaporan yang banyak digunakan sebagai standar pelaporan saat ini oleh perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan adalah GRI G4 *guidelines.*GRI dan pedoman G4 telah membentuk kemitraan kolaboratif dengan program lingungan PBB, Global Compact PBB, dan prakarsa Piagam Bumi. Berikut penjelasan mengenai indikator *Global Reporting Initiative* hal 35 mengatakan bahwa bila tidak ada annual report menggunakan *sustainability report* atau kebaliknnya, G4 *Guidelines* (2006:26)

**Tabel 2.1**

**Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI**

|  |
| --- |
| **Indikator Kinerja : Ekonomi** |
| **Kategori 1 : Ekonomi** |
| **Aspek : Kinerja Ekonomi** |
| **EC1** ***(core)*** | Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan |
| **EC2** ***(core)*** | Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim |
| **EC3** ***(core)*** | Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti |
| **EC4** ***(core)*** | Bantuan financial yang diterima dari pemerintah |

|  |
| --- |
| **Aspek : Keberadaan Pasar** |
| **EC5*****(core)*** | Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan. |
| **EC6** ***(core)*** | Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan |
| **EC7** ***(core)*** | Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan |
| **Aspek : Dampak Ekonomi Langsung** |
| **EC8** ***(core)*** | Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak |
| **EC9** ***(core)*** | Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan |

|  |
| --- |
| **Indikator Kinerja : Lingkungan** |
| **Kategori 2 : Lingkungan** |
| **Aspek : Bahan** |
| **EN1** ***(core)*** | Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume |
| **EN2** ***(core)*** | Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang |
| **Aspek : Energi** |
| **EN3** ***(core)*** | Konsumsi energi dalam organisasi |
| **EN4** ***(core)*** | Konsumsi energi diluar organisasi |
| **EN5** ***(core)*** | Intensitas Energi |
| **EN6** ***(core)*** | Pengurangan konsumsi energi |
| **Aspek: Air** |
| **EN7 (*core)*** | Konsumsi energi diluar organisasi |
| **EN8*****(core)*** | Total pengambilan air berdasarkan sumber |
| **EN9** ***(add)*** | Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air |
| **EN10*****(add)*** | Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali |
| **Aspek : Keanekaragaman Hayati** |
| **EN11*****(core)*** | Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung |
| **EN12*****(core)*** | Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung |
| **EN13** ***(add)*** | Habitat yang dilindungi dan dipulihkan |
| **EN14** ***(add)*** | Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan |
| **Aspek: Emisi** |
| **EN 15** | Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1) |
| **EN16*****(core)*** | Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2) |
| **EN17** ***(core)*** | Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3) |
| **EN18*****(add)*** | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) |
| **EN19*****(core)*** | Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) |
| **EN20*****(core)*** | Emisi bahan perusak ozon (BPO) |
| **EN21** ***(core)*** | NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya |
| **Aspek: Efluen dan Limbah** |
| **EN22** ***(core)*** | Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan |
| **EN23*****(core)*** | Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan |
| **EN24*****(add)*** | Jumlah dan volume total tumpahan signifikan |
| **EN25*****(add)*** | Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional |
| **EN26** ***(core)*** | Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi |
| **Aspek : Produk dan Jasa** |
| **EN27** ***(core)*** | Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingungan produk dan jasa |
| **EN28** ***(core)*** | Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategor |
| **Aspek : Kepatuhan** |
| **EN29*****(add)*** | Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan |
| **Aspek : Transportasi** |
| **EN30*****(add)*** | Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja |
| **Aspek : Lain-lain** |
| **EN31** | Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis |
| **Asesmen Pemasok Atas Lingkungan** |
| **EN32** | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan |
| **EN33** | Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambi |
| **Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan** |
| **EN34** | Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi |
| **Indikator Kinerja : Sosial** |
| **SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA** |
| **Aspek : Kepegawaian** |
| **LA1*****(core)*** | Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah |
| **LA2*****(core)*** | Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan |
| **LA3** ***(add)*** | Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender |
| **Aspek : Hubungan Industrial** |
| **LA4*****(core)*** | Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama |
| **Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Kerja**  |
| **LA 5** ***(core)*** | Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja |
| **LA6*****(add)*** | Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender |
| **LA7*****(core)*** | Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka |
| **LA8*****(core)*** | Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja |
| **Aspek : Pelatihan dan Pendidikan** |
| **LA9** | Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan |
| **LA10** | Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti |
| **LA11** | Persentase karyawan yang menerima reviuw kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan |
| **Aspek : Keberagaman dan Kesetaraan Peluang** |
| **LA12*****(add)*** | Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya |
| **Aspek : Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki** |
| **LA13*****(core)*** | Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkanlokasi operasional yang signifikan |
| **Aspek : Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan** |
| **LA14*****(core)*** | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan |
| **LA15** | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaandalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil |
| **Sub Kategori : Hak Asasi Manusia** |
| **Aspek : Investasi** |
| **HR1** ***(core)*** | Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia |
| **HR2*****(core)*** | Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih |
| **Aspek : Non-Diskriminasi** |
| **HR3*****(core)*** | Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil |
| **Aspek : Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama** |
| **HR4*****(core)*** | Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut |
| **Aspek : Pekerja Anak** |
| **HR5*****(core)*** | Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif |
| **Aspek : Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja** |
| **HR6*****(core)*** | Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja |
| **Aspek : Praktik Pengamanan** |
| **HR7*****(core)*** | Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi |
| **Aspek : Hak Adat** |
| **HR8*****(core)*** | Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil |
| **Aspek : Asesmen** |
| **HR9*****(core)*** | Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia |
| **Aspek : Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia** |
| **HR10** | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia |
| **HR11** | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil |
| **SUB KATEGORI : MASYARAKAT** |
| **Aspek : Masyarakat Lokal** |
| **SO1*****(core)*** | Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan |
| **SO2*****(core)*** | Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal |
| **Aspek : Anti-Korupsi** |
| **SO3*****(core)*** | Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi |
| **SO4*****(core)*** | Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi |
| **SO5*****(core)*** | Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil |
| **Aspek : Kebijakan Politik** |
| **SO6*****(add)*** | Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat |
| **Aspek : Anti persaingan** |
| **SO7*****(core)*** | Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya |
| **Aspek : Kepatuhan** |
| **SO8*****(core)*** | Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan |
| **Aspek : Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat** |
| **SO9** | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat |
| **SO10** | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil |
| **Aspek : Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyakat** |
| **SO11** | Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi |
| **Sub Kategori : Tanggung Jawab Produk** |
| **Aspek :** Kesehatan Keselamatan Pelanggan |
| **PR1*****(core)*** | Perbaikan yang dilakukan perusahaan atas dampak kesehatan dan keamanan dari produk/jasa yang dihasilkan perusahaan |
| **PR2*****(add)*** | Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil |
| **Aspek : Pelabelan Produk dan Jasa** |
| **PR3*****(core)*** | Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis |
| **PR4*****(add)*** | Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil |
| **PR5*****(add)*** | Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan |
| **Aspek : Komunikasi Pemasaran** |
| **PR6*****(core)*** | Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan |
| **PR7*****(add)*** | Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil |
| **Aspek : Privasi Pelanggan** |
| **PR8*****(add)*** | Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan |
| **Aspek : Kepatuhan** |
| **PR9*****(core)*** | Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa |

 Sumber : *Global Reporting Initiative* (GRI *Guidelines* G4)

Keterangan :

*Core* = indikator inti yang diidentifikasikan dalam GRI *Guidelines* sebagai indikator yang menarik perhatian bagi mayoritas *stakeholders* dan diasumsikan material.

*Add* = indikator tambahan yang diidentifikasikan dalam GRI *Guidelines* yang mewakili praktik yang muncul atau topik yang mungkin material bagi sebagian organisasi namun tidak bersifat umum.

### *Media Exposure*

Bagi perusahaan yang menyadari pentingnya pengungkapan CSR pasti akan memikirkan bermacam-macam cara untuk memberikan informasi kepada para pemegang sahamnya, termasuk informasi mengenai pengungkapan CSR. Dengan mengkomunikasikan CSR melalui media, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat. (Gusma Alfarizi, 2014)

Terdapat tiga media yang biasanya dipakai perusahaan dalam pengungkapan CSR perusahaan, yaitu melalui media televisi, koran, serta internet (web perusahaan). (Prasethiyo, 2017)

### Kepemilikan Saham Publik

Menurut (Rifqiyah, Tinggi, & Ekonomi, 2016) kepemilikan saham oleh publik adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh publik, yaitu individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham dibawah lima persen yang berada diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin tersebarnya kepemilikan saham perusahaan, maka perusahaan tersebut diharapkan akan mengungkapkan informasi lebih banyak mengenai aktivitas *corporate social responsibility* (CSR).

Sedangkan menurut (Hamdani et al., 2017) kepemilikan saham publik adalah proporsi saham dimiliki oleh masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham diawah 5% (<5%) yang berada di luar manajemen dan tidak memilki hubungan istimewa dengan perusahaan.

### Kualitas Audit

Kualitas audit  dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), mengatakan bahwa sebuah pekerjaan audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan. Kualitas audit dapat diukur dengan laporan audit. (Chrisdinawidanty, Tugiman, & Muslih, 2016)

Sedangkan menurut DeAngelo kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. (Deangelo, 1981)

### Profitabilitas

Menurut (Asnawi, 2017) rasio laba ini menunjukkan tingkat efisiensi yang dapat dihasilkan dari setiap penjualan.

Rasio profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana perusahaan. Rasio profitabilitas yang umummnya digunakan adalah Gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan return on assets. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ROA sebagai proksi dari profitabilitas, karena ROA dapat menunjukkan seluruh aktiva yang diinvestasikan dapat atau tidak menghasilkan laba bagi perusahaan.

### 10.Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi total asset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Dan sebaliknya, semakin rendah total asset mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Semakin besar total asset menunjukkan bahwa semakin besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. (Rifai, Arifati, & Magdalena, 2015)

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini umumnya dikaitkan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga akan semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Maksud dari biaya keagenan disini seperti bonus dan insentif. Sehingga ketika perusahaan melakukan efisiensi biaya agen, principal berusaha menekan agen untuk melakukan tanggung jawab sosial guna menaikkan nilai perusahaan dimata investor yang akan datang yang sudah ada.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Judul Penelitian | Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Profitabilitas dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* |
| Nama Peneliti | Ida Bagus Gde Indra Wedhana Purba dan Putu Yadnya |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Independen : Ukuran Perusahaan dan *Leverage*Dependen : Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Berpengaruh Secara Positif Terhadap CSR.  |
| 2.Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, LIkuiditas, dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012 |
| Nama Peneliti | Reka Maiyarni, Susfayetti dan Misni Erwati |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Variabel Penelitian | Independen : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan *Leverage*Dependen : *Corporate Social Responsibility* |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan *Leverage* Berpengaruh Secara Negatif Terhadap CSR.  |
| 3.Judul Penelitian | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
| Nama Peneliti | Rizkia Anggita Sari |
| Tahun Penelitian | 2012 |
| Variabel Penelitian | Independen : Tipe Industri (*profile*), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Perushaaan (growth) dan *Leverage*Dependen : *Corporate Social Responsibility* |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Berpengaruh Secara Positif Terhadap CSRD. Sedangkan *Leverage* dan *Growth* Tidak Berpengaruh Terhadap CSRD. |
| 4.Judul Penelitian | Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan *Size* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia |
| Nama Peneliti | Syailendra Eka Saputra |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen : *Leverage*, Profitabilitas dan *Size*Dependen : Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* |
| Hasil Penelitian | *Leverage* Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, *Size* Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. |
| 5.Judul Penelitian | Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan *Coporate Social Responsibility* |
| Nama Peneliti | Dody Hapsoro |
| Tahun Penelitian | 2012 |
| Variabel Penelitian | Independen : Proporsi Kepemilikan Institusuional, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit dan Kualitas Audit Dependen : *Corporate Social Responsibility* |
| Hasil Penelitian | Proporsi Kepemilikan Institusional Tidak Terbukti Berpengaruh Positif Terhadap CSR, Ukuran Dewan Komisaris Terbukti Berpengaruh Positif Terhadap CSR, Proporsi Komisaris Independen Tidak Terbukti Berpengaruh Positif Terhadap CSR, Ukuran Komite Audit Terbukti Berpengaruh Positif Terhadap CSR dan Kualitas Audit Terbukti Berpengaruh Positif Terhadap CSR. |
| 6.Judul Penelitian | Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan |
| Nama Peneliti | Badingatus Solikhah dan Arga Mustika WInarsih |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen : Kepekaan Industri, Komisaris Independen, *Multiple Directorships*, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Liputan Media , Keragaman *Gender*, dan Kepemilikan Institusional.Dependen : *Corporate Social Responsibility* |
| Hasil Penelitian | Kepekaan Industri, Komisaris Independen, *Multiple Directorships*, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Berpengaruh Terhadap pengungkapan lingkungan . Sedangkan Liputan Media, Keragaman *Gender* dan Kepemilikan Institusional Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Pengungkapan LIngkungan. |
| 7.Judul Penelitian | Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* |
| Nama Peneliti | Rheza Dwi Respati dan Paulus Basuki Hadiprajitno |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Variabel Penelitian | Independen : Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Pengungkapan MediaDependen : *Corporate Social Responsibility* |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas dan *Leverage* Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan CSR. Sedangkan Ukuran Perusahaan, Tipe Industri dan Pengungkapan Media Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Pengungkapan CSR.  |
| 8.Judul Penelitian | Pengaruh Kepemilikan Saham Publik dan *Return On Assets* Terhadap Pengungkapan *Coporate Social Responsibility* |
| Nama Peneliti | Shifa Putri Hamdani, Willy Sri Yuliandari dan Eddy Budiono |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Independen : Kepemilikan Saham Publik dan *Return On Assets*Dependen : *Corporate Social Responsibility* |
| Hasil Penelitian | Kepemilikan Saham Publik dan *Retun On Assets* Berpengaruh Secara Positif Terhadap CSR |
| 9.Judul Penelitian | Pengaruh Kecukupan Modal Dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Dengan Rasio Kredit Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perbankan. |
| Nama Peneliti | Nur Afni Yunita dan Mita Yolanda |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen : Kecukupan Modal, Penyisihan Penghapusan Aktiva Porduktif, Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Hubungan Antara Kecukupan Modal, Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Hubungan Antara Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.Dependen : *Profitabilitas* |
| Hasil Penelitian | *Loan To Deposit Ratio* dan Rasio Kredit Hubungan Antara Penyisihan Penghapusan Kredit Berpengaruh Terhadap Profitabilitas , Penghapusan Aktiva Produktif Berpengaruh Negatif Terhadap Profitabilitas, Rasio Kredit Bermasalah yang Diproksikan dengan *Non Performing Loan* Memediasi Hubungan Antara Kecukupan Modal dengan Profitabilitas Tidak Berpengaruh. |

## C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilkakukan untuk meneliti beberapa faktor yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu *media exposure*, kepemilikan saham publik,kualitas audit*,* ukuran perusahaan dan profitabilitas.

1. **Pengaruh *Media Exposure* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Media mempunyai peran untuk mendorong manajemen dalam melakukan pengungkapan CSR untuk mendapat kepercayaan serta legitimasi dari masyarakat atau komunitas sosialnya melalui kegiatan CSR. Pengkomunikasian CSR melalui bebagai media akan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Menurut (Ratnasari, 2012) media internet/website adalah media yang paling efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang mulai meningkat. Dengan adanya pengungkapan CSR melalui media website diharapkan masyarakat dapat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan akan dikenal dan memiliki nilai sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. (Gusma Alfarizi, 2014) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berhasil menemukan adanya hubungan positif antara media exposure terhadap pengungkapan CSR, penellitian tersebut didukung oleh penelitian dari (Gusma Alfarizi, 2014) yang menyatakan pengungkapan CSR melalui media perusahaan memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR, hal itu menadakan bahwa pengungkapan informasi melalui media perusahaan/website mendapatkan respon yang positif dari para stakeholders sehingga dapat mempengaruhi tindakan manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *media exposure* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1. **Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik di dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan publik dalam perusahaan, maka tingkat pengungkapan informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada publik akan semakin luas guna menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan, dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena publik memiliki fungsi kontrol untuk mengawasi kegiatan manajemen agar perusahaan dijalankan dengan benar dan kepentingan dalam perusahaan terpenuhi. (Lorena & Hanny, 2016)

Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Deva, Wulandari, & Tryanto, 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang artinya semakin tinggi kepemilikan saham publik maka akan meningikatkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan.

1. **Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Menurut (Hapsoro, 2012) bahwa kualitas audit yang ditentukan dari laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *big-four* dan kantor akuntan *non big-four*. Diasumsikan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *big-four* lebih memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *non big-four*. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsoro sendiri memang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hapsoro juga telah melakukan penelitian yang mengatakan bahwa kualitas audit terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Kualitas audit juga mempengaruhi pengungkapan atas *Corporate Social Responsibility.* Dengan adanya kualitas audit yang memadai dan baik tentunya akan membuat sebuah perusahaan untuk cenderung mengungkapkan penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunannya. (Hartati, 2014)

Berikut ditampilkan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Media Exposure*

Kepemilikan Saham Publik

Kualitas Audit

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ukuran Perusahaan

Profitabilitas

 Hipotesis Penelitian

Ha1 : *Media Exposure* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Ha2 : Kepemilikan Saham publik perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Ha3 : Kualitas Auditberpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan